



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru perlu adanya penyesuaian dalam melakukan perubahan peraturan daerah baik yang bersifat urusan wajib maupun pilihan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menyepakati dengan memasukkan kembali Rancangan Peraturan Daerah baik yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban yang sebelumnya sudah dilakukan konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 ke Gubernur Jawa Timur dengan memasukkan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a diatas, Bupati Tuban bersama DPRD Kabupaten Tuban perlu untuk penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tuban tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023 ;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2022.

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tuban tanggal 23 Februari 2023;
4. Surat Ketua DPRD tanggal 9 Februari 2023 Nomor 176/97/414.050/2023 dengan perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2023;
3. Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2023 Nomor 188/6424/013.2/2023 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Propemperda Tahun Anggaran 2023.
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tanggal 1 Maret 2023 dengan acara Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dengan keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari : Usulan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban :

1. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Raperda tentang Desa Wisata
3. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Raperda tentang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh

6. Raperda tentang Pencegahan Kebakaran
7. Raperda tentang Perubahan Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usulan Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban :
 1. Raperda Tentang Cagar Budaya, Sejarah dan Permuseuman;
 2. Raperda Tentang Ketenagakerjaan;
 3. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 4. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 5. Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Kabupaten Tuban;
 7. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 8. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 02TAHUN 2023
TANGGAL : 1 MARET 2023
TENTANG
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023**

USULAN RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TUBAN :

1. RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
2. RAPERDA TENTANG DESA WISATA
3. RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5. RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH
6. RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN KEBAKARAN
7. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
8. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

USULAN RAPERDA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN :

1. RAPERDA TENTANG CAGAR BUDAYA, SEJARAH DAN PERMUSEUMAN;
2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN;
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT;
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO;
5. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;

6. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUMDA KABUPATEN TUBAN;
7. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022;
8. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023;
9. RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN



H. M. MIZADI, S.Ag, MM